

**KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH**



Skripsi Oleh:

HOSIANNA AGNESSA

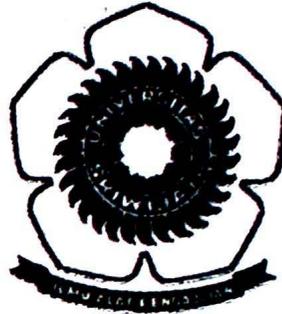
NIM 01081003041

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA
Tahun 2012**

S
336.014
Hos
K

**KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH**



Skripsi Oleh:

HOSIANNA AGNESSA

NIM 01081003041

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA
Tahun 2012**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : HOSIANNA AGNESSA

Nim : 01081003041

Jurusan : AKUNTANSI

Fakultas : EKONOMI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul :

**KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH**

Pembimbing

Ketua : Drs. H. Harun Delamat, M.Si, Ak.

Anggota : Ika Sasti Ferina, S.E, M.Si, Ak,

Tanggal diuji : 03 Mei 2012

adalah benar-benar hasil karya saya di bawah bimbingan tim pembimbing.

Isi skripsi ini tidak ada hasil karya orang lain yang saya salin keseluruhan atau sebagian tanpa menyebutkan sumber aslinya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan, termasuk pembatalan gelar kesarjanaan saya.

Inderalaya, 07 Mei 2012

Yang memberi pernyataan,



HOSIANNA AGNESSA

NIM 01081003041

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : HOSIANNA AGNESSA
NIM : 01081003041
JURUSAN : AKUNTANSI
MATA KULIAH : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI : KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA
BENGKULU DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal Mei 2012 Ketua :



Drs. H. Harun Delamat, M.Si, Ak.
NIP. 195501131990031002

Tanggal Mei 2012 Anggota:



Ika Sasti Ferina, S.E, M.Si, Ak,
NIP. 19780210200111222001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA : HOSIANNA AGNESSA
NIM : 01081003041
JURUSAN : AKUNTANSI
MATA KULIAH : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI : KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA
BENGKULU DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Telah dilaksanakan ujian komprehensif pada tanggal 3 Mei 2012 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 3 Mei 2012

Ketua



Drs. H. Harun Delamat, M.Si, Ak.
NIP. 195501131990031002

Anggota



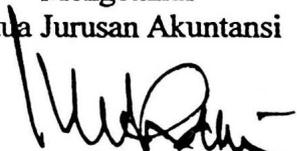
Ika Sasti Ferina, SE, M.Si, Ak.
NIP. 197802102001122001

Anggota



Emylia Yuniartie, SE, M.Si, Ak.
NIP. 197106021995032002

Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi



Drs. Burhanuddin, M.Acc, AK
NIP 195808281988101001

MOTTO

- Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku; kepada-Nya hatiku percaya. (Mazmur 28 :7)
- Barangsiapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barangsiapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. (Lukas 16:10)
- *If you want something, go get it! (Film: The Pursuit Of Happiness)*
- *Imagination is more important than knowledge. (Albert Einstein)*
- *Dream is not something to be dreamed, but something that you can reach. (Camui Gackt)*
- *Faith is something gives you strenght. (Amy Winehouse)*

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Kedua Orang Tuaku tercinta
- ❖ Saudara-saudaraku terkasih
- ❖ Sahabat-sahabatku
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penulisan skripsi ini mengambil judul **“Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bengkulu dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah”**. Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Teori, Bab III Gambaran Umum, Bab IV Analisis dan Pembahasan, dan Bab V Kesimpulan dan Saran.

Data utama yang digunakan adalah data sekunder dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Bengkulu berupa laporan realisasi anggaran dan dokumen-dokumen lainnya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Bengkulu dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada penerimaan dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah masih belum dapat diandalkan bagi daerah untuk otonomi daerah, karena relatif rendahnya basis pajak/ retribusi yang ada di daerah dan kurangnya pendapatan asli daerah yang dapat digali oleh pemerintah daerah.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Bengkulu dan menjadi acuan untuk penelitian dan pengembangan selanjutnya mengenai kemampuan keuangan daerah.

Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam skripsi.

Penulis,

Hosianna Agnessa

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bengkulu dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah”**. Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan dukungan, baik moril maupun materiil dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, MBA, Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Prof. H. Syamsurijal A.K, Ph.D, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Drs. Burhanuddin, M.Acc., Ak., Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Drs. H. Harun Delamat, M.Si, Ak., Pembimbing I Skripsi.
5. Ika Sasti Ferina, S.E, M.Si, Ak., Pembimbing II Skripsi.
6. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
7. Kepala dan staf pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu
8. Staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
9. Kedua orang tuaku yang tercinta, Drs. H. Manik dan Roselina, S.Pd yang tidak pernah lelah memberi dukungan sepenuhnya, baik doa, semangat, maupun pendanaan. Semoga semua pengorbanan yang dilakukan untukku dapat terbalas dengan budi baik dan keberhasilanku suatu hari nanti.
10. Saudara dan saudariku yang terkasih, Uly Eva Magdalena, Friesda Rotua Rumondang, Benny Alex Aries Simorangkir yang telah memberi semangat dan menjadi tempat berkeluh kesah, serta selalu siap mendukungku bila menghadapi kesulitan dan membutuhkan semangat dan nasehat.
11. Alexander Aritonang, sosok laki-laki tangguh yang mengajarkanku untuk menjadi lebih kuat.
12. Sahabat *Sixfrenly*, Dyta, Winda, Ayu, Anggun, dan Tika. Semua canda, tawa, kerja keras, usaha, susah, dan pahit yang pernah kita jalani bersama selama ini semoga

menjadi kenangan manis yang tidak akan pernah terlupa sampai kapanpun. *I'll be missing the moment we share together.*

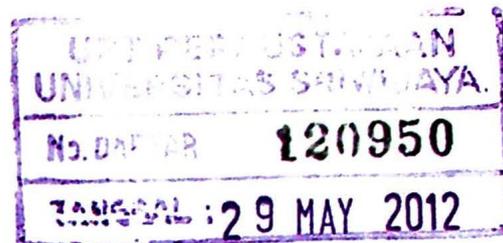
13. Saudara-saudariku terkasih, Lenni Pasaribu, Krisbon Ambarita, Beny Pasaribu, Alpon Limbong, Darwin Damanik, Mei Sagala. Terima kasih untuk setiap bantuan, perhatian, dan hangatnya kebersamaan yang boleh aku rasakan selama menjalani hari-hari di tanah rantau Inderalaya ini.
14. Sahabat-sahabatku sejak SMA, Dara Trisiana dan Tessa Rulianty. Senang memiliki sahabat seperti kalian. Aku selalu mengingat saat-saat kita bisa berbagi bersama, bahkan saat jarak memisahkan kita masih boleh untuk terus mengingat dan peduli satu sama lain.
15. Teman-teman sejawat angkatan 2008 di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Teman-teman yang selama tiga tahun delapan bulan ini bersama-sama menjalani perkuliahan dan saling memberi semangat.
16. Semua pihak-pihak lain yang telah turut membantu dalam penyusunan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik dan berkah kepada kita semua.
Amin.

Penulis,

Hosianna Agnessa

DAFTAR ISI



	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAKSI	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Review Penelitian Terdahulu.....	5
1.5. Metodologi Penelitian	6
1.5.1 Jenis Penelitian.....	6
1.5.2 Obyek Penelitian	6
1.5.3 Data dan Sumber Data	7
1.5.4 Metode Pengumpulan Data	8
1.5.5 Metode Analisis Data	8
1.6. Manfaat Penelitian	13
1.7. Sistematika Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Akuntansi Pemerintahan.....	15
2.1.1. Pengertian Akuntansi Pemerintahan	15
2.1.2. Tujuan Akuntansi Pemerintahan.....	16
2.1.3. Karakteristik Akuntansi Pemerintahan	16
2.1.4. Syarat Akuntansi Pemerintahan	17
2.2. Otonomi Daerah	19
2.2.1 Pengertian Otonomi Daerah	19
2.2.2 Daerah Otonom	21
2.2.3 Hakekat, Tujuan, dan Prinsip Otonomi Daerah	21
2.3. Keuangan Daerah	24
2.3.1. Kemampuan Keuangan Daerah	24
2.3.2. Pengelolaan Penerimaan Daerah	27
2.3.3. Pengelolaan Pengeluaran Daerah	30
2.4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	34
2.5. Analisis Rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	38

BAB III GAMBARAN UMUM	
3.1. Gambaran Umum Kota Bengkulu	45
3.1.1 Sejarah Singkat	45
3.1.2 Letak Geografis	46
3.1.3 Luas Wilayah	46
3.1.4 Batas Wilayah	47
3.1.5 Iklim dan Topografi	47
3.1.5.1 Iklim	47
3.1.5.2 Topografi	47
3.1.6 Wilayah Administrasi	48
3.2 Visi dan Misi Kota Bengkulu	49
3.2.1 Visi Kota Bengkulu	49
3.2.2 Misi Kota Bengkulu	50
3.3 Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Kota Bengkulu	51
3.4 Struktur Organisasi.....	52
3.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu.....	60
3.5.1. Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu	62
3.6 Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan (DP) Kota Bengkulu	63
3.6.1 Komponen Dana Perimbangan (DP) Kota Bengkulu	66
 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	68
4.2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	73
4.3. <i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	75
4.4. Rasio Keserasian	76
4.5. Rasio Pertumbuhan	78
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	80
5.2. Saran	81
 DAFTAR PUSTAKA	 82

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Daerah	9
Tabel 2.1 Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Daerah	26
Tabel 2.2 Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Daerah	40
Tabel 2.3 Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal	41
Tabel 3.1 Jumlah Kelurahan Di Kota Bengkulu Tahun 2008.....	48
Tabel 3.2 Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2007	56
Tabel 3.3 Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2008	57
Tabel 3.4 Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009	58
Tabel 3.5 Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2010	59
Tabel 3.6 Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2011	60
Tabel 4.1 Sumber Pendapatan Dari Pihak Ekstern	68
Tabel 4.2 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2007-2011	69
Tabel 4.3 Kontribusi PAD terhadap TPD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2007-2011	73
Tabel 4.4 Perhitungan DSCR Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2007-2011	75
Tabel 4.5 Belanja Rutin, Pembangunan dan total APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2007-2011	76
Tabel 4.6 Rasio Pertumbuhan APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2007-2011	77

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Laporan Realisasi Anggaran Kota Bengkulu Tahun 2007	84
Laporan Realisasi Anggaran Kota Bengkulu Tahun 2008	87
Laporan Realisasi Anggaran Kota Bengkulu Tahun 2009	89
Laporan Realisasi Anggaran Kota Bengkulu Tahun 2010	91
Laporan Realisasi Anggaran Kota Bengkulu Tahun 2011	93
Surat Keterangan Penelitian	95
Agenda Konsultasi Pembimbing Skripsi	96

Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bengkulu dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Hosianna Agnessa

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Bengkulu dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah untuk Tahun Anggaran 2007-2011. Penelitian dilakukan pada Pemerintah Kota Bengkulu. Data yang digunakan berupa data keuangan Laporan Realisasi Anggaran. Hasil perolehan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif komparatif dengan menggunakan beberapa rasio keuangan.

Analisis yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa rasio kemandirian keuangan daerah dengan rata-rata 6.53% dan tergolong dalam pola hubungan instruktif menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Bengkulu dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat masih relatif rendah. Rasio derajat desentralisasi fiskal hanya memiliki rata-rata 5.38%. Hal ini berarti bahwa tingkat kemandirian/kemampuan keuangan Kota Bengkulu masih rendah dalam melaksanakan otonominya. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* tahun 2007-2009 menunjukkan keadaan keuangan daerah yang baik untuk melakukan pinjaman dan pembayaran kembali, sebaliknya dua tahun terakhir menunjukkan keadaan yang bertolak belakang dan ditunjukkan dengan angka negatif. Pada Rasio Keserasian, pengeluaran belanja rutin lebih besar dibandingkan dengan belanja pembangunan. Rasio Pertumbuhan secara keseluruhan mengalami peningkatan di setiap tahun yang disebabkan bertambahnya pajak dan retribusi daerah. Secara umum, perkembangan keuangan Pemerintah Kota Bengkulu masih kurang.

Kata Kunci: Kemampuan Keuangan, Pemerintah Kota, Otonomi Daerah



Financial Capability of Bengkulu City Government in The Implementation of Autonomy

Hosianna Agnessa

ABSTRACT

This study aims to determine the development of Bengkulu City Government financial capability to support the implementation of autonomy for fiscal years 2007-2011. The study was conducted of Bengkulu City Government. Data used is Budget Realization Report. The results were analyzed using the comparative descriptive method by several financial ratios.

The analysis has been done obtained the following results, financial self sufficiency ratio indicated by the average rate ratio of 6.53% and classified in instructive shows that capability of city government in meeting the needs of funds for implementation of tasks governance, development and services society is still relatively low. Degree of fiscal decentralization ratio has only an average of 5.38%. This means the level of independence/ financial capability of Bengkulu City Government still low in implementing autonomy. In 2007-2009, Debt Service Coverage Ratio (DSCR) shows well financial situation for both borrowing and repayment, otherwise the last two years show the opposite situation and indicated by negative numbers. At harmony ratio, routine expenditure is greater than the development expenditure. The growth ratio, as a whole has increased in each year due to increased taxes and levies. Generally, financial development of Bengkulu City Government still low.

Keywords: Financial Capability, Government of City, Autonomy

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan diubah dengan Perpu No. 3 tahun 2005 serta UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat & Daerah, menjadi tonggak awal dari otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah, berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut (Bastian, 2007:2).

Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut peranan pemerintah daerah sangat menentukan berhasil tidaknya menciptakan kemandirian yang selalu didambakan Pemerintah Daerah. Terlepas dari perdebatan mengenai ketidaksiapan daerah di berbagai bidang untuk melaksanakan kedua Undang-Undang tersebut, otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah. Sistem pembangunan terpusat diganti karena dianggap sebagai penyebab lambannya pembangunan dan besarnya ketimpangan antar daerah.

Pemerintah Pusat menyerahkan empat elemen penting kepada Pemerintah Daerah di dalam pelaksanaan otonomi daerah. Keempat elemen tersebut adalah desentralisasi politik, desentralisasi fiskal, desentralisasi administrasi dan desentralisasi ekonomi (Wulandari, 2001:17). Keempat elemen tersebut menjadi

kewajiban daerah untuk mengelola secara efektif dan efisien. Hal tersebut akan mendukung kemampuan/ kemandirian suatu daerah untuk melaksanakan fungsinya dengan baik. Salah satu elemen yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal yang merupakan komponen utama dari desentralisasi pelaksanaan otonomi daerah dan menandai dimulainya babak baru dalam pembangunan daerah serta masyarakatnya dalam mengelola sumber daya/ segenap potensi yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah.

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan semakin besar dengan adanya otonomi daerah, sehingga tanggung jawab yang diembannya akan bertambah banyak. Implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah dapat menjadi suatu berkah bagi daerah. Namun, di sisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk pelaksanaannya, karena semakin besar urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Beberapa aspek yang harus dipersiapkan berkenaan dengan hal itu antara lain sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan pra sarana daerah. Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai sejauh mana daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhan keuangan daerah tanpa menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta

pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah menurut Yuliati (2001:22), adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa PAD harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD maka akan semakin besar pula tersedianya jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Kota Bengkulu yang terletak di pesisir barat pulau Sumatera mempunyai potensi alam untuk dikembangkan menjadi kota pariwisata. Sektor pariwisata seringkali diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam Pendapatan Asli Daerah yang merupakan indikasi penting dalam kemampuan keuangan daerah. Untuk mewujudkan tersebut perlu pendanaan yang cukup besar. Bengkulu tidak bisa mengandalkan dari bantuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun APBN saja. Untuk itu, Bengkulu perlu membuka peluang agar investor diharapkan berminat membangun infrastruktur untuk menunjang sektor pariwisata. PAD Kota Bengkulu dari sektor pariwisata sepanjang tahun 2007-2011 mengalami peningkatan.

Namun peningkatan tersebut belum tentu menjadi begitu berarti dalam mendukung kemandirian keuangan Kota Bengkulu.

Pendapatan Asli Daerah kota Bengkulu sepanjang tahun 2007-2011 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hanya saja pada tahun 2010 menurun sebanyak 4,9% dari Rp 28,046,719,319.11 di Tahun 2009. Sumber keuangan dari PAD didukung dana perimbangan yang dari tahun ke tahun juga meningkat. Jumlahnya relatif besar dibandingkan pendapatan asli daerah yang seharusnya menjadi sumber keuangan utama di era otonomi daerah.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik untuk mengamati lebih lanjut mengenai perkembangan APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2007-2011 dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **"Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bengkulu dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah"**.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perkembangan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Bengkulu dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah?
2. Apa saja kendala yang menghambat perkembangan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Bengkulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat perkembangan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Bengkulu dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang menghambat perkembangan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Bengkulu.

1.4 Review Penelitian Terdahulu

Wulandari (2001), melakukan penelitian tentang kemampuan keuangan daerah di kota Jambi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, kota Jambi dihadapkan pada kendala rendahnya kemampuan keuangan daerah. Hal ini terlihat dari rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah Tingkat ketergantungan pada sumber pendapatan dari pihak ekstern masih cukup tinggi disebabkan karena sumber-sumber keuangan potensial negara adalah milik pemerintah pusat.

Widodo (2001), melakukan penelitian tentang Analisis Rasio Keuangan APBD Kabupaten Boyolali. Hasilnya menunjukkan bahwa kemandirian pemerintah daerah Boyolali dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan masih relatif rendah dan cenderung menurun.

Sakti (2007), dalam penelitiannya tentang perkembangan kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan kemampuan keuangan Kabupaten Sukoharjo masih rendah dalam melaksanakan otonomi daerah. Kemampuan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat masih relatif rendah meskipun dari tahun ke tahun terus meningkat.

Dengan mengacu pada penelitian sebelumnya, tentu saja disesuaikan dengan kemampuan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, penulis ingin mereplikasi

dan mengembangkan penelitian-penelitian tersebut. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan, antara lain:

1. Periode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada periode tahun 2007-2011, sedangkan penelitian sebelumnya pada periode sebelum tahun 2007.
2. Daerah penelitian. Penelitian ini mengambil daerah penelitian di Kota Bengkulu, sedangkan peneliti terdahulu mengambil daerah penelitian di kota Jambi, Boyolali, dan Sukoharjo.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 2003:54). Tujuan dari penelitian ini untuk membuat deskriptif/ gambaran, melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian ini berusaha untuk mendapatkan gambaran tentang perkembangan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Bengkulu dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

1.5.2 Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pemerintah daerah kota Bengkulu. Objek penelitian yang akan digunakan adalah struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau laporan realisasi anggaran kota Bengkulu pada tahun 2007-2011.

1.5.3 Data Dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dan melalui perantara/ diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Indriantoro dan Supomo, 2002:147). Data sekunder dalam penelitian ini adalah data keuangan APBD tahun anggaran 2007-2011.

Data diperoleh dari beberapa instansi pemerintah terkait, dalam hal ini diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu, situs Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan instansi-instansi terkait lainnya.

1.5.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan data yang diperoleh dari sumbernya. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah dengan menggunakan, mengumpulkan, dan mempelajari literatur-literatur dan buku-buku serta artikel yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Studi lapangan

Teknik pengumpulan data yang lain yang dapat dilakukan adalah melalui teknik dokumentasi, yaitu melalui penyelidikan sumber dokumen yang dibutuhkan. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dengan mencari data berupa APBD atau laporan realisasi anggaran pemerintah daerah.

1.5.5 Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Deskriptif komparatif adalah suatu jenis metode penelitian yang ingin mencari jawab secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor terjadinya atau munculnya fenomena tertentu (Nazir, 2003:58).

Data yang berasal dari APBD kemudian dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan daerah yang diukur dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pihak ekstern) antara lain: Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat dan Dana Pinjaman (Widodo, 2001 : 262).

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

$$\text{Rasio kemandirian} : \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Sumber Pendapatan dari Pihak Ekstern}}$$

Tabel 1.1
Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola hubungan
Rendah sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber : Halim (2002:169)

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi resiko kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal atau otonomi fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan TPD, menurut hasil penelitian Tim Fisipol UGM menggunakan skala interval

sebagaimana terlihat dalam tabel 1.2 adalah sebagai berikut (Wulandari, 2001 : 22):

Tabel 1.2
Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

%	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Wulandari (2001: 22)

Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DDF : \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100 \%$$

Keterangan :

DDF : Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD_t : Total PAD Tahun t

TPD_t : Total Pendapatan Daerah Tahun t

3. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*

Dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah, selain menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah dapat menggunakan alternatif sumber dana lain, yaitu dengan melakukan pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan itu adalah:

1. Ketentuan yang menyangkut persyaratan:
 - a. Jumlah kumulatif pinjaman daerah yang wajib dibayar maksimal 75% dari penerimaan APBD tahun sebelumnya.
 - b. DSCR minimal 2,5.

DSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan PAD Bagian Daerah (BD) dari Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Sumber Daya Alam dan bagian daerah lainnya serta Dana Alokasi Umum setelah dikurangi Belanja Wajib (BW), dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

$$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU - BW)}{\text{Total (Pokok Angsuran + Bunga + Biaya Pinjaman)}}$$

2. Ketentuan yang menyangkut penggunaan pinjaman
 - a. Pinjaman jangka panjang digunakan membiayai pembangunan yang dapat menghasilkan penerimaan kembali untuk pembayaran pinjaman dan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai pelayanan masyarakat.
 - b. Pinjaman jangka pendek untuk pengaturan arus kas.
3. Ketentuan yang menyangkut prosedur
 - a. Mendapat persetujuan DPRD
 - b. Dituangkan dalam kontrak

4. Rasio Keserasian

Keserasian ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja



pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana rasio keserasian ini dapat diformulasikan sebagai berikut (Widodo, 2001: 262) :

$$\text{Rasio Belanja Rutin} : \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} : \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja APBD}}$$

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode lainnya. Pertumbuhan APBD dilihat dari berbagai komponen penyusun APBD yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, total pendapatan, belanja rutin dan belanja pembangunan (Widodo, 2001 : 270):

Rumus yang digunakan adalah:

$$r : \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Keterangan :

P_n : Data yang dihitung pada tahun ke-n

P_o : Data yang dihitung pada tahun ke-0

r : Pertumbuhan

Apabila semakin tinggi nilai PAD , TPD dan Belanja Pembangunan yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Rutin, maka

pertumbuhannya adalah positif. Ini berarti bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode yang berikutnya. Selanjutnya jika semakin tinggi nilai PAD, TPD, dan Belanja Rutin yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Pembangunan, maka pertumbuhannya adalah negatif. Ini berarti bahwa daerah yang bersangkutan belum mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode yang berikutnya.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

- a. Menjadi bahan masukan bagi perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan pembangunan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah.
- b. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang direncanakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan secara terperinci mengenai masalah pokok pemikiran yang melandasi permasalahan yang akan dibahas yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, review penelitian terdahulu, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi pembahasan tentang akuntansi pemerintahan, otonomi daerah, tinjauan keuangan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan analisis rasio APBD.

Bab III GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini akan dijelaskan kondisi atau gambaran umum objek yang diteliti, yaitu Pemerintah Kota Bengkulu.

Bab IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan melakukan analisis dan pembahasan mengenai kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Bengkulu dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil analisis data dan pembahasan serta saran-saran yang dapat diberikan kepada pemerintah Kota Bengkulu.